

RINGKASAN EKSEKUTIF

Faktor Keberhasilan dalam Digitalisasi Pajak

OKTOBER 2020



**BETTER THAN CASH
ALLIANCE**



FAKTOR KEBERHASILAN DALAM DIGITALISASI PAJAK

Penulis

Dr. Jay Rosengard
Dosen Kebijakan Publik di Harvard Kennedy School

Ketua Proyek

Rodrigo Mejia Ricart, Camilo Tellez (Better Than Cash Alliance)
dan Fabiola Salman, Charlie Habershon (Dalberg)

Foto Sampul: ©Better Than Cash Alliance / Junarya photography

Laporan ini menyajikan contoh terbaru yang menunjukkan dengan lugas bahwa pembayaran digital dapat mengubah kehidupan jutaan orang menjadi lebih baik. Di negara berkembang, seluruh proses terkait digitalisasi pembayaran pajak dapat meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar USD 300 miliar¹ setiap tahun. Ini mewakili hampir sepertiga dari kesenjangan pendanaan sebesar USD 1 triliun, yang menghalangi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDG*).² *SDG* adalah rencana kerja atau *roadmap* untuk umat manusia, kemakmuran bersama, dan kehidupan di planet ini; mencapai *SDG* akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama bagi komunitas maupun ekosistem yang paling rentan di dunia.

Dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19³ yang destruktif telah memperbanyak tantangan yang perlu diatasi *SDG*. Hal ini juga meningkatkan kebutuhan akan solusi yang telah terbukti dapat menjaga ketercapaian *SDG*. Digitalisasi sistem pajak merupakan solusi yang telah terbukti, serta semakin dibutuhkan saat ini. Hingga sekarang, lebih dari 100 negara di seluruh dunia telah mengambil lebih dari 800 langkah kebijakan pajak dalam menanggapi COVID-19. Digitalisasi memudahkan otoritas pajak untuk membebaskan maupun memungut pajak, dan memudahkan individu maupun bisnis untuk membayarnya, serta memberi banyak manfaat lain seperti inklusi keuangan. Melalui berbagai cara yang dijelaskan dalam laporan ini, digitalisasi yang bertanggung jawab memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pada situasi sekarang, digitalisasi memiliki peran amat penting bagi pemerintah yang sedang menghadapi tekanan parah pada anggaran nasional, bersamaan dengan perlunya mengerahkan pengeluaran yang amat besar untuk melindungi populasi dan ekonominya.

Digitalisasi pajak juga akan menjadi perhatian pemerintah pada saat pemetaan pemulihan negara dari pandemi COVID-19. Digitalisasi pajak dapat menumbuhkan infrastruktur keuangan yang lebih kuat dan membangun kepercayaan dengan mitra internasional, juga meningkatkan layanan publik secara signifikan, sekaligus mengurangi kebutuhan transaksi pajak secara langsung seiring dengan pemulihan ekonomi.

Laporan ini merupakan dasar pembuktian sekaligus panduan praktis untuk membantu para pembuat kebijakan agar memanfaatkan potensi digitalisasi dengan optimal. Studi kasus yang terperinci akan menunjukkan bagaimana tiga negara terdepan telah mendigitalisasi sistem administrasi perpajakan mereka, sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan domestik.⁴ Kasus-kasus ini menegaskan urgensi bagi pemerintah saat ini untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang efektif serta inklusif untuk mengatasi situasi darurat dengan lebih baik di masa depan. Contohnya yaitu:



Rwanda

Bersamaan dengan reformasi pajak, investasi dalam layanan pajak digital antara tahun 2010 hingga 2016 telah meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari 13,1% menjadi 16,6%, dan menghasilkan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 14% dalam pendapatan yang dikumpulkan dari tahun 2010 hingga 2018.



Meksiko

Diwajibkan faktur elektronik (*e-invoice*) antara tahun 2012 hingga 2017 telah mendorong peningkatan pendapatan pajak sebesar 48% dari barang dan jasa, meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari 12,6% menjadi 16,2%. Dari tahun 2010 hingga 2016, keseluruhan pendapatan pajak dan kontribusi jaminan sosial meningkat sekitar 95%, menjadi lebih dari USD 177 miliar.



Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu entitas nasional Indonesia yang bertanggung jawab untuk memungut pajak nasional, telah menerapkan digitalisasi sebagai sarana penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang mengarah pada efisiensi waktu kepatuhan pajak bisnis sebesar 20% antara tahun 2014 hingga 2019.

DEFINISI

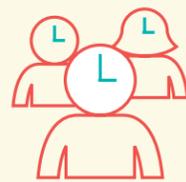
Digitalisasi administrasi pajak mengacu pada pendekatan digital dan berbasis data untuk optimalisasi fungsi serta operasional otoritas pajak. Termasuk di dalamnya adalah pendaftaran wajib pajak, pengarsipan, kepatuhan (*compliance*) dan audit, pembayaran, perselisihan, serta layanan wajib pajak secara luas yang mempertimbangkan pengalaman pengguna.

5 manfaat utama yang telah dicapai pemerintah melalui digitalisasi sistem pajak



Pendapatan yang lebih tinggi karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak

Penghindaran dan penggelapan pajak menyebabkan kerugian pendapatan secara signifikan, yang dapat diperoleh kembali secara substansial melalui digitalisasi. Contohnya, penelitian telah memperkirakan bahwa pemerintah kehilangan pendapatan sebesar USD 200 miliar setiap tahun karena penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional skala besar.⁵ Digitalisasi sistem pajak yang digabung dengan sistem Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information* atau AEOI), sebagai kerangka kerja internasional di mana informasi pajak secara otomatis dibagikan antara otoritas pajak di negara atau yurisdiksi yang berbeda, akan memungkinkan negara berkembang untuk memulihkan USD 40–50 miliar setiap tahun dari pendapatan pajak perusahaan belaka.⁶ Di Meksiko, 83% wajib pajak yang telah disurvei menganggap bahwa mereka kemungkinan besar akan menghadapi penalti apabila gagal memenuhi kewajiban pajak.⁷ Di Rwanda, jumlah pembayar pajak terdaftar mengalami kenaikan hampir dua kali lipat setelah *e-filing* dan *e-payment* diperkenalkan, dari 144.000 menjadi 242.000.



Menurunkan biaya administrasi dengan otomatisasi

Menghilangkan proses manual mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Bukti terbaru dari Filipina, Ghana, dan negara lain menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memangkas biaya pemungutan pajak sebanyak 30%.⁸ Meksiko mengurangi biaya pemungutan sebesar 57% antara tahun 2006 hingga 2018, sementara Indonesia mengefisienkan waktu kepatuhan pajak bisnis sebesar 20% antara tahun 2014 hingga 2019.⁹ Di Rwanda, mesin penagihan elektronik mampu mengurangi rata-rata waktu yang diperlukan bisnis untuk mengajukan pengembalian PPN, dari 45 jam menjadi 5 jam.¹⁰



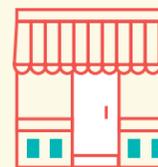
Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dapat mengarah pada pengurangan kebocoran dan korupsi

Pengalihan otoritas pajak ke platform digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi. Di Afghanistan, total pendapatan pada tahun 2016 lebih tinggi 20% dibandingkan tahun 2015. Departemen Pendapatan Pajak di Afghanistan menyebutkan alasan kenaikan tersebut karena adanya sistem pengumpulan pajak otomatis yang diterapkan di titik-titik pengumpulan. Sistem yang otomatis tersebut secara signifikan menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi beban administrasi dalam mengelola kas.¹¹



Data yang lebih baik membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif

Digitalisasi pajak menghasilkan data yang lebih tepat waktu, akurat, serta terperinci. Digitalisasi pajak sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja G20 2019–2021 tentang Anti-Korupsi, yang menuntut pemerintah untuk mempromosikan integritas dan transparansi melalui penggunaan teknologi baru.¹² Hal ini memungkinkan otoritas pajak untuk melacak pengumpulan pendapatan dengan lebih baik, mengukur kepuasan pengguna, maupun menilai kinerja staf. Di Meksiko, pengambilan data dilakukan berdasarkan standarisasi, dan otoritas pajak nasional secara teratur membagikan informasi dengan entitas lain seperti unit intelijen Kementerian Keuangan, Institut Jaminan Sosial Meksiko, Institut Dana Perumahan Nasional untuk Pekerja, Perbankan Nasional dan Komisi Saham, Kementerian Ekonomi, serta pemerintah daerah.



Basis pajak yang lebih luas sebagai hasil dari meningkatnya formalisasi bisnis

Besarnya perekonomian informal (misalnya 34% dari PDB di Afrika Sub-Sahara¹³) berarti basis pajak yang lebih sedikit serta pendapatan yang lebih sedikit. Digitalisasi pajak telah mendorong perusahaan kecil, yang didefinisikan oleh OECD sebagai bisnis dengan 10 hingga 49 karyawan, untuk secara bertahap memformalkan dan membayar pajak.¹⁴ Sebagai respons terhadap undang-undang yang mewajibkan faktur elektronik pada tahun 2014, Meksiko pun membawa sekitar 4,2 juta perusahaan mikro ke dalam perekonomian formal.¹⁵ Pada 2016, produksi barang dan jasa formal naik hampir 50%, yang secara signifikan meningkatkan basis pajak. Hal ini pun berkontribusi pada peningkatan rasio pajak sebesar 21% terhadap PDB negara antara 2014 hingga 2016.

RANGKUMAN MANFAAT DAN TANTANGAN DIGITALISASI PAJAK

	 PEMERINTAH	 PELAKU BISNIS	 INDIVIDU
Proposisi nilai utama	Meningkatkan pendapatan pajak dengan biaya administratif lebih rendah	Menurunnya beban menuju kepatuhan pajak	Menurunnya beban menuju kepatuhan pajak
Keuntungan	Pendapatan meningkat Biaya admin rendah Transparansi meningkat, sehingga menekan korupsi dan lebih dipercaya keabsahannya Kebijakan berbasis data Formalisasi bisnis meningkat	Waktu dan sumber daya untuk pajak dapat diefisienkan Meningkatkan transparansi pajak Meningkatkan penggunaan teknologi untuk kepatuhan	Mengurangi waktu dan sumber daya untuk pajak (mis. advisor) Menambah kepercayaan terhadap institusi
Tantangan	Tantangan pada implementasi Rendahnya penerimaan awal Risiko keamanan dan kerahasiaan data pribadi (mis. penyalahgunaan oleh pemerintah atau terjadi peretasan)	Meningkatnya tekanan karena permintaan informasi Biaya adaptasi dan pembelajaran Risiko keamanan dan kerahasiaan data pribadi (mis. penyalahgunaan oleh pemerintah atau terjadi peretasan)	Tenggat waktu yang lebih kaku Risiko ketimpangan sistem pajak apabila tidak punya akses digital Risiko keamanan dan kerahasiaan data pribadi (mis. penyalahgunaan oleh pemerintah atau terjadi peretasan)

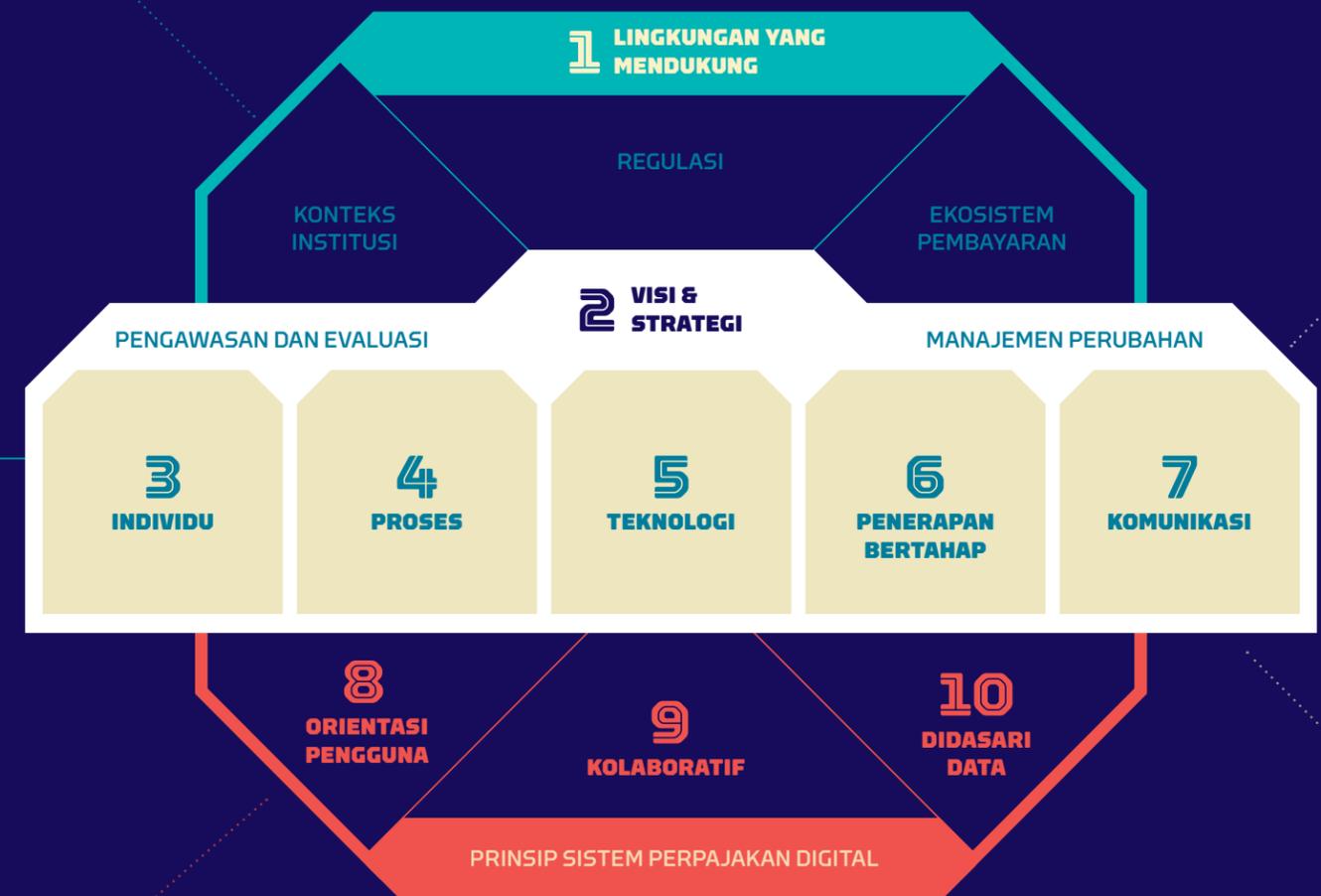
Panduan

Laporan ini merangkum praktik terbaik dari seluruh dunia dan memberikan panduan langkah-demi-langkah bagi pemerintah untuk membantu digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan memaksimalkan manfaatnya. Sepuluh faktor kesuksesan telah diidentifikasi berdasarkan penelitian tentang digitalisasi, dan kami menyajikannya pada studi kasus mendalam dari tiga negara yang telah mengambil langkah strategis pada digitalisasi sistem perpajakan selama beberapa tahun belakangan: Indonesia, Meksiko, dan Rwanda. Studi kasus ini dirancang untuk mendukung administrator pajak, pembuat kebijakan, sektor swasta layanan dukungan pajak, serta semua pihak yang mempertimbangkan maupun telah menerapkan inisiatif digitalisasi.

GAMBAR 1: Faktor kesuksesan di atas ini membahas kerangka kerja keseluruhan untuk merancang sistem pajak digital yang sukses. Kerangka kerja ini mencakup lingkungan yang mendukung, mengacu pada landasan penting untuk pembayaran dan administrasi pajak digital, juga faktor strategis maupun operasional, serta prinsip umum untuk inisiatif digitalisasi pajak.

Landasan penting untuk administrasi pajak digital
Proyek transformasi digital pada otoritas pajak seringkali merupakan inisiatif ambisius yang berlangsung bertahun-tahun. Lingkungan tempat proyek-proyek ini dilaksanakan akan berdampak langsung pada tingkat keberhasilan yang dicapai. Misalnya, jika kerangka hukum dan peraturan tidak mengakui validitas secara hukum dari interaksi digital dengan otoritas pajak, ini berarti pendaftaran wajib pajak secara langsung masih diperlukan, yang akan meniadakan manfaat efisiensi dan penekanan biaya dari digitalisasi.

Visi, strategi, manajemen perubahan, pemantauan, dan evaluasi
Negara-negara yang berhasil dalam digitalisasi sistem perpajakan memulainya dengan visi yang jelas dan strategi yang kuat untuk merealisasikannya. Pilar utama dari strategi digitalisasi yang efektif adalah manajemen perubahan.



Prinsip menyeluruh untuk sistem pajak digital
Prinsip ini termasuk memprioritaskan pengguna jasa, menurunkan biaya kepatuhan (compliance), serta menambah kapabilitas data untuk meningkatkan inteligensi pajak, kepatuhan, maupun penyampaian layanan. Meningkatkan inteligensi dan penyampaian layanan pada lintas bidang kebijakan publik juga memerlukan kerja sama otoritas pajak dengan lembaga publik dan sektor swasta lainnya.

Implementasi efektif
Implementasi yang efektif membutuhkan perancangan ulang proses-proses, serta adanya investasi untuk menarik, mempertahankan, dan mengembangkan bakat yang tepat untuk menyampaikan strategi yang telah disepakati. Pengelolaan proyek teknologi yang kompleks membutuhkan pendekatan baru, termasuk iterasi dan pengujian bertahap. Strategi digitalisasi yang sukses selalu disertai komunikasi yang jelas dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk memastikan keselarasan serta memperhatikan pendapat ataupun kepentingan seluruh pihak. Tak kalah penting adalah sistem pemantauan dan pelaksanaan yang kuat, untuk membantu otoritas pajak menjaga inisiatif digitalisasi tetap berada di jalur atau arah yang benar, sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pajak seringkali rumit dan penuh tantangan, ia juga berpotensi memberikan manfaat besar bagi pemerintah, bisnis, dan individu jika dirancang dan diterapkan secara efektif. Yang terpenting, manfaat ini dapat mendorong inklusi keuangan dan peluang ekonomi, khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal. Pengalaman Indonesia, Meksiko, dan Rwanda memberikan gambaran yang menarik tentang kekuatan sistem pajak digital untuk membantu mencapai SDG dengan menumbuhkan pendapatan pemerintah serta memberdayakan individu maupun bisnis.



Rwanda

Konsistensi perjalanan pajak digital Rwanda telah memberikan hasil yang sangat mengesankan dan memiliki pelajaran berharga bagi wilayah lain. Visi strategis untuk seluruh pemerintahan Rwanda dan adanya fokus pada peningkatan berkelanjutan menjadikan Rwanda sebagai pemimpin regional dalam penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja sistem pajak. Beberapa pelajaran penting yaitu: (1) memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan mendorong penggunaan sistem dan proses baru; (2) kerja sama efektif dengan sektor swasta untuk menciptakan model penyampaian layanan pajak digital yang layak secara komersial; dan (3) mengadopsi pendekatan tangkas untuk implementasi perangkat lunak.

Seiring perjalanan digitalisasi Rwanda terus meningkat, muncul peluang baru untuk mendorong kemajuan, misalnya:

- **Memperkuat kapabilitas** organisasi dengan merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta digital terbaik.
- **Menggunakan wawasan dari data untuk meningkatkan pengumpulan dan kepatuhan** dengan memeriksa ulang sumber data, misalnya mesin penagihan elektronik dan transaksi yang sesuai dengan PPN.
- **Meningkatkan investasi dalam menyederhanakan layanan pajak untuk usaha kecil dan mikro**, termasuk mengakomodasi beragam tingkat literasi dan akses terhadap teknologi informasi, terutama dengan fokus terhadap inklusi gender.



Meksiko

Meksiko telah menerapkan serangkaian reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang mampu meningkatkan rasio pajak terhadap PDB secara luar biasa, yaitu 4 persen poin antara tahun 2012 hingga 2016. Perjalanan digitalisasi pajak negara tersebut memiliki banyak pelajaran untuk diambil, mulai dari: (1) menyusun visi dan strategi yang menarik sebagai pendorong perubahan yang utama, mampu membantu menyelaraskan dan mempertahankan upaya ini dari waktu ke waktu; (2) mengamankan pembiayaan yang fleksibel maupun berjangka panjang untuk memastikan bahwa upaya reformasi ini akan berkelanjutan; dan (3) menggunakan data untuk terus meningkatkan operasi internal serta layanan terhadap pelanggan sebagai kunci bagi otoritas pajak untuk mencapai tujuan strategisnya.

Sementara Meksiko terus mendorong digitalisasi pajak, beberapa peluang berikut dapat dieksplorasi lebih lanjut:

- **Mempromosikan ekosistem pembayaran digital yang inklusif.** Penggunaan pembayaran digital yang lebih luas di seluruh perekonomian membantu mendorong inklusi keuangan, memperluas basis pajak, dan memberikan lebih banyak data kepada otoritas pajak tentang aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kepatuhan.
- **Menyederhanakan proses pajak untuk memungkinkan layanan wajib pajak digital yang mulus.** Upaya digitalisasi menawarkan peluang untuk semakin menyederhanakan layanan guna mengurangi biaya kepatuhan, yang akan mendorong penyerapan yang lebih besar oleh pembayar pajak. Hal ini dapat menciptakan siklus yang baik dengan memberikan pendapatan yang lebih besar kepada pemerintah untuk diinvestasikan dalam reformasi peningkatan produktivitas selanjutnya.
- **Bekerja sama dengan pemerintahan daerah.** Memberi dukungan bagi otoritas pajak daerah dan kota dalam perjalanan digital mereka, terutama melalui penyelarasan yang lebih baik di seluruh tingkat pemerintahan, akan menghasilkan manfaat signifikan bagi semua pemangku kepentingan, baik individu maupun bisnis.



Indonesia

Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perjalanan pajak digitalnya, dengan melewati kompleksitas pengelolaan sistem pajak digital di beragam tingkat pemerintahan, 17.000 pulau, dan lebih dari 600 kelompok etnis dan bahasa. Indonesia menawarkan banyak pelajaran untuk wilayah lain, termasuk: (1) secara aktif mengelola perubahan dan berinvestasi pada sumber daya manusia, meningkatkan pelatihan bagi petugas pajak, dan menawarkan skema remunerasi yang lebih kompetitif untuk mempertahankan dan merekrut staf yang terampil;¹⁶ (2) memanfaatkan ekosistem digital yang sedang tumbuh, dalam kemitraan dengan sektor swasta, untuk memberi pembayar pajak akses yang lebih besar ke layanan-bernilai-tambah (*value-added services*) melalui penyedia layanan pihak ketiga; dan (3) menyelaraskan pemangku kepentingan demi proses pengadaan yang efektif, dengan dukungan dari tingkat pemerintahan tertinggi.

Sejalan dengan perjalanan digitalisasi Indonesia, peluang berikut patut dipertimbangkan:

- **Mengartikulasikan dan membangun dukungan untuk strategi digitalisasi pajak jangka panjang.** Membantu para pemangku kepentingan memahami perjalanan digitalisasi negara serta besarnya potensi manfaat dapat membantu meningkatkan dukungan, penyerapan, dan inovasi.
- **Berfokus pada penyederhanaan dan optimalisasi proses, terutama untuk prosedur pasca-pengarsipan.** Misalnya, apabila pernyataan PPN pemasok tidak secara sistematis diperiksa dengan pernyataan PPN pembeli. Hal ini telah mengakibatkan penghindaran pajak melalui faktur palsu.
- **Menekankan kembali standarisasi data untuk optimalisasi alur proses.** Arsitektur data sistem yang digunakan untuk melaporkan pajak yang berbeda (mis. PPN, Pajak Penghasilan Pribadi) seringkali berbeda, sehingga analisis data menjadi sangat menantang. Pengumpulan data yang terstandarisasi akan memungkinkan diolahnya lebih banyak wawasan berbasis data untuk mendukung pembuatan kebijakan dan implementasi yang lebih efektif.
- **Terus memanfaatkan ekosistem pembayaran digital yang berkembang di negara ini melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface* atau *API*) publik.** API publik memungkinkan otoritas pajak menawarkan layanan baru kepada pembayar pajak secara cepat, meningkatkan pengalaman pengguna dalam membayar pajak. Proses ini perlu dikelola dengan hati-hati, dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab dalam melindungi pengguna akhir dan data pribadi mereka.

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini tidak dapat terlaksana tanpa kontribusi Suahasil Nazara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ana Teresa Alvarez Hernández dan Tania Santoyo dari Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, dan Eric Rwigamba selaku Direktur Jenderal Pengembangan Sektor Keuangan Minecofin (Ministry of Finance). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suryo Utomo, Iwan Djuniardi, dan Eka Darmayanti dari Jenderal Pajak Indonesia, Juan Pablo de Botton, Ernesto Miguel Sánchez Ruiz dan Luis Cartas Paredes dari Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México; Denis Mukama, Fred Karara, dan Richard Dada dari Rwanda Revenue Authority; berbagai lembaga pemerintah Indonesia, Meksiko, dan Rwanda; industri jasa keuangan secara luas, serta pakar global yang telah memberi sudut pandang, meneliti, serta menganalisis.

Better Than Cash Alliance (BTCA) ingin berterima kasih kepada Dalberg Global Development Advisors sebagai mitra teknis penting yang ditugaskan oleh BTCA untuk membantu melakukan studi diagnostik, terutama Fabiola Salman, Charlie Habershon, dan Joe Dougherty selaku penulis teknis dari laporan ini. BTCA khususnya berterima kasih atas kontribusi yang sangat dibutuhkan dari Dr. Jay Rosengard. Selain itu, BTCA juga berterima kasih kepada Macarena Machimbarrena yang berkontribusi melalui wawasan, penelitian, dan analisisnya untuk penelitian ini.

Tim penyusun juga ingin menyampaikan penghargaan tulus kepada anggota Komite Editorial dan Publikasi BTCA. Panduan, arahan, dan wawasan dari mereka telah membantu meningkatkan kualitas laporan ini secara signifikan.

Laporan ini amat terbantu oleh panduan strategis dari Dr. Ruth Goodwin-Groen, Direktur Pelaksana BTCA. Camilo Tellez-Merchán adalah anggota tim setara yang bergabung dengan kami pada misi lapangan tentang negara, serta membantu pengumpulan data. Selain itu, kami berterima kasih kepada Sajib Azad, Gisela Davico, Oswald Kahonde, Isvary Sivalingam, dan Angela Corbalán atas dukungan untuk pelibatan pemangku kepentingan, termasuk dalam mengembangkan pesan advokasi atas hasil penilaian ini.

Better Than Cash Alliance

Better Than Cash Alliance (BTCA) adalah kemitraan global berisi pemerintahan, perusahaan, serta organisasi internasional yang mempercepat transisi dari pembayaran tunai ke digital untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Berbasis di United Nations Capital Development Fund (UNCDF), BTCA memiliki 75 anggota yang bekerja erat dengan organisasi global lainnya, sebagai mitra pelaksana G20 tentang Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (GPFI).

Catatan kaki

- 1 McKinsey, 2018, The trillion-dollar prize: Plugging government revenue leaks with advanced analytics, dibaca 29 Mei 2020 dari <https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/the-trillion-dollar-prize-plugging-government-revenue-leaks-with-advanced-analytics>.
- 2 Perkiraan ini dibuat sebelum penyebaran global COVID-19. Kesenjangan pendanaan diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan terakhir, karena pendapatan pemerintah menurun akibat resesi yang dipicu oleh pandemi.
- 3 OECD, 2020, *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*, dibaca 1 Mei 2020 dari https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-06rakt0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis.
- 4 Antara 2014 hingga 2018, jumlah negara yang menerima pajak penghasilan secara digital nyaris berlipat ganda, dari 73 menjadi 139
- 5 Wier, L., Tørsløv, T., and Zucman, G., 2019, *The Missing Profits of Nations*, paper dari NBER 24701, revisi September 2019, dibaca 29 Mei 2020, dari <http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2019.pdf>.
- 6 Shaxson, N., 2019, *Tackling Tax Havens*, IMF Finance & Development, September 2019, Vol. 56, dibaca 1 Mei 2020, dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxson.htm>.
- 7 SAT, n.d., *Datos abiertos del SAT*, Secretaria De Hacienda Y Credito Publico, dibaca 29 Oktober 2019, dari http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html.
- 8 USAID, *Collecting Taxes Database: Full Data Base*, dibaca 7 November 2019, dari <https://www.usaid.gov/what-we-do/economic-growth-and-trade/domestic-resource-mobilization/collecting-taxes-database>.
- 9 Bank Dunia, 2019, *Doing Business 2020*, Asia & Pacific, dibaca 4 November 2019, dari <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>
- 10 Bizimungu, J., 2018, 'Billing machines slash tax payment process by 89 per cent', *The New Times*, 6 April, dibaca 29 Oktober 2019, dari <https://www.newtimes.co.rw/rwanda/billing-machines-slash-tax-payment-process-89-cent>
- 11 Kementerian Keuangan Republik Islam Afghanistan, 2018. *Reforms in Review Part 3: Revenue Collection and Tax Reform*, dibaca 1 Mei 2020 dari <http://policymof.gov.af/home/reforms-in-review-part-3-revenue-collection-and-tax-reform/>.
- 12 G20 Anti-Corruption Working Group Action Plan 2019-2021 and Extract from G20 Leaders Communiqué, dibaca 29 Mei 2020 dari [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/WGB/RD\(2018\)10&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/WGB/RD(2018)10&docLanguage=En)
- 13 IMF, 2019, *The Global Informal Economy: Large but On The Decline*, dibaca 12 November 2019, dari <https://blogs.imf.org/2019/10/30/the-global-informal-economy-large-but-on-the-decline/>.
- 14 OECD, 2017, *Entrepreneurship at a Glance 2017*, dibaca 1 Mei 2020, dari https://doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en.
- 15 OECD, 2017, *Technology tools to tackle tax evasion and tax fraud*, dibaca 7 November 2019, dari <https://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.htm>.
- 16 ADB, 2020. *Comparative analysis of tax administration in Asia and the Pacific*, Philippines, dibaca 12 November 2019, dari <https://www.adb.org/publications/comparative-analysis-tax-administration-asia-pacific-2020>.

WWW.BETTERTHANCASH.ORG

BILL & MELINDA
GATES foundation



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development



ISBN 978-1-7350409-1-2



90000 >



9 781735 040912